

BAB V

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Simpulan

Merujuk pada temuan penelitian tentang pengaruh Pajak Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di berbagai Kabupaten/Kota di Indonesia periode 2022-2023. Berdasarkan hasil analisis regresi, beberapa temuan signifikan dapat disimpulkan:

1. Pajak Daerah Nilai t sebesar 1.727 dengan p -value .010 menunjukkan bahwa Pajak Daerah (PD_X1) signifikan pada level signifikansi 0.05. Angka tersebut mengindikasikan Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap IPM.
2. Dana Alokasi Khusus dengan nilai t sebesar 9.059 dengan p -value sebesar .015 membuktikan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK_X2) signifikan pada level signifikansi 0.05. Ini menandakan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap IPM.
3. Dana Alokasi Umum signifikan pada level signifikansi 0.05. Ini mengindikasikan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap IPM.
4. Dana Bagi Hasil Nilai t sebesar 4.347 dengan p -value .002 membuktikan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH_X4) signifikan pada level signifikansi 0.05. Angka tersebut mengindikasikan bahwa DBH berpengaruh signifikan

terhadap IPM.

5. Nilai signifikansi (p-value) untuk uji F sebesar 0.002. Nilai ini menunjukkan tingkat signifikansi dari uji F. Dalam konteks statistik, p-value kurang dari 0.05 dianggap signifikan. Dengan nilai p-value 0.002, kita dapat menyimpulkan bahwa model regresi dalam studi ini secara keseluruhan signifikan pada level signifikansi 0.05. Ini berarti bahwa semua variabel bebas (Pajak Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, Indeks Pembangunan Manusia.
6. Berdasarkan data di atas R^2 merupakan koefisien determinasi yang menunjukkan proporsi variabilitas pada variabel terikat yang mampu diterangkan oleh variabel bebas dalam model. Nilai 0.704 menunjukkan bahwa 70.4% dari variasi dalam IPM dapat diterangkan oleh variasi dalam Pajak Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil. Ini membuktikan bahwa model memiliki kemampuan penjelas yang cukup tinggi.

B. Implikasi

1. Implikasi Teoritis

Hasil kajian ini memberikan bukti empiris bahwa pajak daerah dan dana perimbangan dapat memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Hasil tersebut juga berhasil mengonfirmasi bahwa teori keagenan berhasil secara tepat menjelaskan variabel pajak daerah dan dana

perimbangan terhadap pengaruhnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Secara teoritis, penelitian ini membantu memperkuat penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan hubungan pajak daerah dan dana perimbangan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat serta dapat menambah literatur dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu akuntansi. Tidak hanya itu, temuan penelitian ini dapat memperkaya dan memperluas landasan teoritis yang ada untuk mengembangkan penelitian selanjutnya.

2. Implikasi Praktis

a. Bagi Perusahaan/Individu

Perusahaan atau individu masyarakat diharapkan dapat meningkatkan peran sertanya dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan ikut serta mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan seperti halnya patuh dalam pembayaran pajak daerah.

b. Bagi Pemerintah

Optimalisasi Penggunaan Dana Transfer Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan penggunaan DAK, DAU dan terutama DBH untuk program-program pembangunan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Langkah-langkah strategis dalam pengelolaan dan akuntabilitas dana perlu diperkuat untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaannya.

C. Keterbatasan Penelitian

1. Masalah Endogenitas Meskipun telah dilakukan analisis regresi, penelitian ini mungkin masih menghadapi masalah endogenitas yang terkait dengan korelasi antara variabel bebas dan terikat. Faktor-faktor lain di luar model, seperti kebijakan nasional yang lebih luas atau faktor eksternal lainnya, mungkin juga berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal.
2. Generalisasi Terbatas Hasil dari penelitian ini mungkin tidak dapat langsung diterapkan secara umum ke semua daerah di Indonesia. Variabilitas regional yang signifikan dalam karakteristik sosial, ekonomi, dan politik dapat mempengaruhi respons terhadap kebijakan dan penggunaan dana transfer antar pemerintah.
3. Keterbatasan dalam Pengukuran Kesejahteraan Penggunaan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai pengukuran kesejahteraan masyarakat dapat memiliki keterbatasan dalam mencakup semua dimensi kesejahteraan yang relevan, seperti ketimpangan ekonomi, kualitas lingkungan hidup, atau partisipasi dalam kehidupan politik.